Bandar Maulana
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 30, No. 1, Maret 2025
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

PERANAN ORGANISASI *TIONG HOA HWEE KOAN* (THHK) DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI KOTA PURBALINGGA, 1945-1958

Joshua Emanuel Senjaya*, Chandra Halim
Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
Jl. STM Pembangunan, Mrican, Depok, Sleman
Email*: joshuaemanuels2000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti latar belakang berdirinya organisasi *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) di Kota Purbalingga, layanan pendidikan yang diselenggarakan, serta pengaruh organisasi tersebut terhadap masyarakat di Purbalingga. Sejak tahun 1831 ketika Purbalingga diambilalih oleh kolonial Belanda dan menjadi bagian dari Karesidenan Banyumas banyak kebijakan baru yang diterapkan, salah satunya adalah pembagian penduduk menjadi tiga golongan yaitu Orang Eropa, Orang Timur Asing dan Orang Bumiputera. Kebijakan ini mendorong sejumlah pengusaha Tionghoa untuk bersedia memberikan dukungan mendirikan sekolah hingga akhirnya berdiri sekolah THHK Purbalingga. Sekolah THHK Purbalingga pada tahun 1945-1958 telah memberi pengajaran setara dengan sekolah nasional antara lain membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, kesenian dan olah raga. Sekolah-sekolah THHK juga memberikan pelajaran bahasa Mandarin, Indonesia dan Inggris, Budi Pekerti sesuai ajaran Konghucu. Sekolah THHK juga menerima anak-anak dari kalangan Bumiputera. Dengan demikian organisasi THHK tidak hanya menjadi menjadi wadah bagi orang-orang Tionghoa untuk mendiskusikan berbagai permasalahan komunitasnya, namun juga memelihara kerukunan dan solidaritas antar warga di Purbalingga.

Kata Kunci: *Organisasi, Tionghoa, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), Purbalingga, pendidikan*

ABSTRACT

This study examines the background behind the establishment of the Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) organization in Purbalingga City, the educational services it provided, and its impact on the local community in Purbalingga. Since 1831 when Purbalingga was taken over by the Dutch colonial and became part of the Banyumas Residency, many new policies were implemented, one of this was the division of the population into three groups: Europeans, Foreign Orientals, and Indigenous People. This policy encouraged a number of Chinese entrepreneurs to support the creation of schools, until finally the THHK Purbalingga school was established. The THHK Purbalingga school from 1945-1958 has provided education equivalent to national schools including reading, writing, arithmetic, geography, arts and sports. The schools also taught Mandarin, Indonesian, and English language lessons, Budi Pekerti (Moral Education) according to Confucian value. THHK schools also open to Indigenous children. Thus, the THHK organization was not only a place for Chinese people to discuss various community issues, but also helped maintain harmony and solidarity among residents of Purbalingga.

Keywords: *Organization*, *Tionghoa*, *Tiong Hoa Hwee Koan (THHK)*, *Purbalingga*, *education*

PENDAHULUAN

Hubungan antara Tiongkok dan Nusantara sebenarnya telah terbentuk sejak abad V Masehi. Bermula dari sebuah perjalanan religi yang dilakukan seorang Pendeta Buddha bernama Fa Hian (Faxian) yang sempat singgah di Jawa selama 5 bulan (Desember 413-Maret 414 M) dalam perjalannya menuju India sekitar tahun 399-414 M (Setiono, 2002:19). Selama berada di Jawa, ia tidak bertemu dengan orang Tionghoa lainnya (Groeneveldt, 2018:2). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa saat itu belum ada orang Tionghoa yang mengunjungi Jawa. Perjalanannya tersebut dicatat dalam Buku *Fahueki*. Pada tahun 671 M, ada pendeta lainnya bernama I Tsing yang mengunjungi Sriwijaya. Bahkan ia sempat tinggal di sana selama 14 tahun dan banyak menulis kejadian serta adat-istiadat yang ada di Sriwijaya.

Arus kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia pada dasarnya terbagi dalam beberapa gelombang. Salah satunya adalah ekspedisi pelayaran yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho pada tahun 1405. Dalam pelayarannya tersebut, Cheng Ho sempat mengunjungi beberapa kerajaan di Nusantara seperti Samudera Pasai dan Majapahit untuk menjalin hubungan diplomasi (Aziz, 2021:52). Pada saat inilah para pedagang Tiongkok mulai melakukan perdagangan di daerah-daerah pesisir Nusantara. Orang-orang Tionghoa yang datang ke Pulau Jawa sebagian besar merupakan pedagang internasional yang menjual barang-barang dari negeri timur. Meskipun begitu ada juga yang bekerja di bidang yang lain seperti petani, pengrajin dan buruh. Bahkan di luar jawa ada orang-orang Tionghoa yang didatangkan oleh penguasa daerah setempat sebagai buruh kontrak di perkebunan.

Seiring berjalannya waktu, ada sejumlah pedagang Tionghoa yang memutuskan menetap dan menikah dengan penduduk setempat karena pada masa itu umumnya para pedagang yang datang adalah laki-laki yang tidak membawa pasangan. Apalagi setelah adanya peraturan dari Dinasti Qing yang melarang warganya yang telah bermukim di negeri lain untuk kembali ke Tiongkok (Suryadinata, 1999:224). Dari sinilah terbentuk suatu kelompok masyarakat baru yang dikenal sebagai komunitas Peranakan. Dalam perkembangannya, jumlah masyarakat Tionghoa semakin meningkat dengan adanya para pendatang baru dari Tiongkok pada abad XIX-XX. Masa tersebut sekaligus menjadi puncak migrasi orang-orang Tionghoa ke Nusantara. Dengan demikian masyarakat Tionghoa berdasarkan pada kebudayaan dapat dibedakan menjadi dua yakni Peranakan dan Totok (*Singkek*). Masyarakat peranakan telah melakukan penyesuaian diri dengan kebudayaan lokal seperti bahasa, pakaian dan kebiasaan sehari-hari. Sedangkan istilah "Totok" merujuk pada masyarakat Tionghoa yang masih mempertahankan tradisi dan kebudayaan leluhur sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Di samping itu, terdapat anggapan umum di kalangan Tionghoa saat ini bahwa istilah "Peranakan" digunakan untuk menyebut orang-orang Tionghoa yang telah lahir di Indonesia dalam beberapa generasi dan memiliki garis keturunan Indonesia. Sedangkan "Totok" digunakan untuk menyebut para pendatang baru yang masih memiliki garis keturunan murni dari Tiongkok. Oleh karena itu golongan ini juga disebut *Singkek* yang berarti tamu baru (Onghokham, 2005:2-6; Suryadinata, 1984:85-93).

Migrasi besar-besaran etnis Tionghoa ke Nusantara terjadi sejak abad ke-18 hingga abad ke-20. Salah satunya disebabkan oleh faktor politik yaitu peralihan kekuasaan dari Dinasti Ming ke Dinasti Qing pada 1644. Sedangkan faktor lainnya adalah kemunduran perekonomian yang terjadi di Tiongkok pada awal abad ke-19. Kondisi ini juga merupakan imbas dari campur tangan Imperialisme Barat (A. Dahana, 2000:56). Terutama setelah kekalahan Tiongkok dari Inggris pada Perang Candu (1839-1842 dan 1856-1860). Dengan demikian banyak warga yang memutuskan pergi dari kampung halamannya untuk mencari peruntungan di wilayah Asia Tenggara. Orang-orang Tionghoa yang tiba di Hindia Belanda pada masa itu, semakin menyebar ke berbagai wilayah termasuk di Purbalingga.

Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) merupakan sebuah organisasi Tionghoa Peranakan yang berfokus pada pelestarian kebudayaan Tionghoa terutama ajaran Konghucu dan penyelenggaraan pendidikan. Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 17 Maret tahun 1900 di Batavia. Tepatnya berlokasi di Jalan Patekoan No. 19 (Sekarang Jalan Perniagaan Jakarta). Tujuan utama pendirian organisasi ini adalah untuk mengembangkan ajaran Konghucu serta mengubah kebiasaan orang-orang Tionghoa yang saat itu sering melakukan pemborosan yang sia-sia, ketika mengadakan upacara pernikahan dan pemakanan. THHK awalnya hanyalah organisasi sosial biasa, tempat para anggotanya dapat saling bertukar pikiran untuk memajukan ajaran Konghucu, kebudayaan serta tradisi Tionghoa. Kemudian pada tanggal 11 Juni 1900, Phoa Keng Hek (Presiden THHK Batavia) mengadakan pesta ulang tahun di Teluk Pucung. Dalam acara yang dihadiri oleh para pengurus THHK ini barulah terjadi pembicaraan yang akhirnya memunculkan ide untuk mendirikan sebuah sekolah Tionghoa modern.

Pada 17 Maret 1901, THHK secara resmi dibuka sebuah sekolah untuk anak-anak keturunan Tionghoa di Hindia Belanda dengan nama THHT (*Tiong Hoa Hak Tong*). Nama *Tiong Hoa Hak Tong* diambil dari Bahasa dialek Hokkian yang artinya "Sekolah Tionghoa". THHK Batavia pada dasarnya mengikuti model pengajaran modern yang telah diterapkan di Tiongkok dan Jepang. Sistem Pendidikan di Tiongkok telah mengalami perkembangan sejak 1891, yang ditandai dengan dibukanya sejumlah Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar modern yang mengacu pada model Pendidikan di Jepang. Modernisasi pendidikan pada dasarnya saling terhubung dengan semangat pembaharuan di masing-masing negara. Hal ini juga terjadi di Jepang saat berlangsungnya Restorasi Meiji pada tahun 1872. Pendidikan yang diterapkan di sana langsung mengambil contoh dari Barat.

Kehadiran sekolah ini didorong oleh beberapa faktor yaitu keprihatinan bahwa hingga akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda kurang memberi perhatian terhadap pendidikan masyarakat Tionghoa. Meskipun ada segelintir kalangan Tionghoa yang diperbolehkan masuk ke sekolah Belanda atau bisa menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (SR). Namun tidak semua keturunan Tionghoa dapat masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Salah satu penyebabnya karena SR hanya dapat menerima murid Tionghoa, jika ada tempat yang kosong (Leo Suryadinata, 1988:6). Oleh sebab itu kehadiran organisasi ini tentunya memberi alternatif lain bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sebuah institusi pendidikan formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sejarah. Metode penelitian sejarah memiliki beberapa langkah yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi serta diakhiri dengan proses penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013:69).

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Wawancara diperlukan untuk menggali kesaksian langsung dari para pelaku yang pernah terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah THHK Purbalingga yaitu orang-orang yang pernah menjadi murid maupun pengajar di sekolah ini pada periode 1950-an. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan beberapa pengurus organisasi THHK Purbalingga.

Studi pustaka digunakan untuk mengidentifikasi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia serta faktor-faktor yang mendorong komunitas ini untuk mendirikan organisasi THHK yang bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan. Adapun yang termasuk dalam sumber primer yaitu berupa arsip organisasi THHK Purbalingga (Sekarang PMP), foto-foto, serta surat kabar dari periode tersebut. Kemudian sumber sekunder yang dipergunakan berupa buku peringatan pendirian maupun yang secara khusus mengkaji tentang etnis Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupannya.

Selanjutnya setiap data yang dipergunakan harus melalui tahap verifikasi untuk menguji kebenaran dari sumber tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Contohnya seperti menguji keakuratan tanggal-tanggal yang tertera di jurnal penelitian dengan sumber sezaman yang ada. Hal ini juga dapat dilakukan dalam proses wawancara yaitu dengan membandingkan kesaksian antara narasumber dengan rentang usia yang hampir sama. Terutama karena sebagian besar narasumber sudah berusia lanjut, maka dirasa penting untuk mengkritisi Informasi yang disampaikan oleh narasumber.

Kemudian data-data yang telah telah diverifikasi, selanjutnya akan dianalisis serta ditafsirkan kembali sesuai dengan rumusan masalah, teori, dan tujuan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Hasil dari proses inilah yang dapat disebut sebagai fakta sejarah. Kemudian fakta-fakta tersebut akan dirangkai menjadi sebuah narasi sejarah yang memiliki koherensi mendalam. Tahapan akhir dari penelitian sejarah adalah penulisan sejarah yang berisi penyampaian berbagai temuan di lapangan. Kemudian disusun menjadi satu laporan penelitian yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Berdirinya THHK di Purbalingga

Dalam waktu singkat, keberhasilan THHK Batavia dalam merintis sebuah sekolah "modern" telah tersebar secara luas hingga berhasil menarik antusiasme orang-orang Tionghoa di berbagai daerah. Sejak tahun 1902-1903, ada sejumlah tokoh Tionghoa yang mengirimkan surat kepada pengurus di Batavia. Antara lain berasal dari Bogor, Semarang, Purbalingga dan Malang. Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan bahwa warga Tionghoa di wilayahnya berminat untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang sekiranya memiliki tujuan yang sama dengan THHK Batavia. Secara tidak langsung keberadaan organisasi ini telah merekatkan persaudaraan antara kaum peranakan di Hindia Belanda. Selain itu reaksi tersebut juga menegaskan bahwa mereka tengah menghadapi permasalahan serupa di bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Pada tahun 1903 warga Tionghoa di Purbalingga juga ingin membuka sebuah sekolah dengan nama sekolah Tionghoa THHK. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga Tionghoa yang kurang mampu. Dalam teori organisasi Neo Klasik, aspek psikologis dan sosial lebih ditekankan untuk mengidentifikasi perilaku para anggota organisasi. Salah satu faktor yang mendorong terbentuknya sebuah organisasi kebudayaan adalah adanya suatu persamaan tujuan yang ingin diwujudkan oleh para anggotanya sebagai satu kelompok masyarakat. Pada umumnya warga Tionghoa yang tergerak menjadi anggota dari organisasi ini berasal dari kalangan pengusaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran mereka akan sangat mendukung dalam pelaksanaan program kerja maupun pengadaan berbagai sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Jika dilihat dari aspek sosialnya, para pengusaha Tionghoa ini tergerak untuk bekerja sama mendirikan sekolah THHK di Purbalingga didorong oleh kesadaran sebagai satu kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam Pendidikan. Oleh sebab itu, nantinya sekolah ini diharapkan akan membawa perbaikan dalam sistem pengajaran bagi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda.

Proses pendirian THHK Purbalingga lebih lanjut tercatat dalam Riwayat 40 tahun THHK Batavia (1940). Melalui sumber tersebut diketahui bahwa Gan Thian Koey dan Siem Tjing Hien sebagai perwakilan dari warga Tionghoa Purbalingga telah mengirimkan surat kepada pengurus THHK Batavia pada tanggal 30 Juni 1903. Surat tersebut berisi permohonan untuk mencarikan seorang guru sekolah karena penduduk di Purbalingga berniat untuk membuka sekolah dengan nama Sekolah Tionghoa THHK dan ingin ditempatkan di bawah naungan pengurus di Batavia. Surat tersebut diajukan atas permintaan 48 orang warga Tionghoa di sana. Kemudian setelah menerima surat

tersebut, pihak THHK Batavia segera menindaklanjutinya dengan menggelar pertemuan pada 16 Agustus 1903. Pada pertemuan tersebut akhirnya diputuskan bahwa THHK Batavia akan membantu mencarikan guru untuk warga Purbalingga, asalkan para pengurus nantinya bersedia mematuhi segala ketentuan yang dibuat oleh THHK Batavia (Nio Joe Lan, 1940:51). Seiring berjalannya waktu, banyak permintaan serupa yang diterima oleh pengurus di Batavia. Ditambah lagi ada pihak-pihak yang mendesak agar staf pengajarnya nanti didatangkan langsung dari Tiongkok. Permintaan tersebut telah disanggupi oleh THHK Batavia, dengan ketentuan bahwa akomodasi (tempat tinggal) dan pembiayaan guru yang bersangkutan selama mengajar akan ditanggung oleh para pengurus THHK di daerah tersebut (Nio Joe Lan, 1940:57). Dari sebab inilah, kerjasama dari setiap anggota organisasi sangat dibutuhkan demi menjamin berlangsungnya proses belajar-mengajar di sekolah Tionghoa yang akan didirikan. Meskipun begitu pihak pengurus di Batavia tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan berupa buku-buku serta perlengkapan mengajar lainnya.

Pada awalnya organisasi ini tidak berniat mengadakan cabang di luar Batavia. Oleh sebab itu ketentuan mengenai hal ini juga tidak tercantum dalam *Statuten* (Anggaran Dasar) pendirian organisasi. Namun karena banyaknya permintaan untuk bergabung, maka para pengurus berupaya melakukan perubahan dalam AD/ART agar nantinya organisasi ini memiliki hak untuk mengadakan cabang. Pengubahan tersebut akhirnya disetujui oleh Gubernur Jendral dengan *Besluit* No. 9 tertanggal 18 Maret 1904 (Nio Joe Lan, 1940:55).

Gambar 1. Anggota Dewan THHK P



Sumber: Nio Joe Lan, "*Riwajat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwe Koan - Batavia (1900-1939)"*, (Batavia: THHK Batavia, 1940), hlm. 355

Setelah melalui berbagai persiapan, maka THHK Purbalingga akhirnya resmi berdiri pada tanggal 22 Desember 1905 yang terdiri dari 48 anggota dewan. Kemudian diakui sebagai cabang THHK Batavia pada 18 Januari 1906. Adapun tujuan yang ingin dicapai organisasi ini berdasarkan AD/ART yaitu:

1. Melestarikan dan memajukan kebudayaan Tionghoa di Purbalingga sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.
2. Membangun sebuah ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah orang-orang Tionghoa di Purbalingga. Sekaligus sebagai tempat pengajaran atau sekolah yang diberikan secara cuma-cuma kepada anak-anak yang tidak mampu.
3. Membuat sebuah ruang bacaan yang dilengkapi dengan buku-buku dan literatur lainnya.
4. Memberi bantuan, baik secara moril maupun materil pada para ahli waris dari anggota perkumpulan yang telah meninggal dunia.

Dinamika Pendidikan Tionghoa di Purbalingga

Perjalanan Pendidikan etnis Tionghoa di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai peraturan yang ditetapkan oleh para pemegang tampuk pemerintahan di negeri ini sejak masa kolonial Belanda, Jepang hingga pemerintahan Republik Indonesia. Tentunya setiap penguasa memiliki sikap yang berbeda terhadap keberadaan sekolah-sekolah Tionghoa di wilayahnya.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Pendidikan di Hindia Belanda hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja seperti orang-orang Eropa maupun kalangan priyayi. Penyebab utamanya adalah sistem segregasi (Pemisahan berdasarkan ras) yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Keresahan inilah yang pada akhirnya mendorong komunitas Tionghoa peranakan untuk mendirikan sekolah-sekolah melalui organisasi THHK. Organisasi ini dikelola sendiri oleh warga Tionghoa dengan melibatkan para pengusaha lokal sebagai penyandang dana. Keberadaan organisasi ini menjadi tonggak awal pendidikan modern bagi etnis Tionghoa di Hindia Belanda. Kedepannya sekolah ini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang terdidik dan selangkah lebih maju dari leluhurnya sehingga mampu menghadapi perkembangan zaman yang ada.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah kolonial mulai merasa terancam dengan kehadiran sekolah-sekolah THHK. Apalagi setelah mengetahui pertumbuhan sekolah-sekolah Tionghoa yang begitu pesat dan adanya perhatian dari pemerintah Tiongkok terhadap pendidikan di sekolah tersebut, Hal ini dikhawatirkan akan membuat pemerintah kehilangan kontrol terhadap masyarakat Tionghoa, karena berkembangnya semangat nasionalisme Tiongkok di Hindia Belanda. Oleh sebab itu pada 1908, pemerintah Kolonial memutuskan untuk membuka sekolah yang diperuntukan bagi siswa Tionghoa yang disebut HCS (*Hollandsch Chineesche School*) (Rohmah 2014:397). Pada dasarnya sekolah ini sama seperti pendidikan Eropa pada umumnya yang menggunakan pengantar Bahasa Belanda. Dalam kurikulumnya tidak memuat materi pembelajaran Tionghoa sama sekali. Dengan kata lain kehadiran sekolah ini sebenarnya hanya ditujukan untuk menandingi pengaruh sekolah-sekolah THHK. Kemudian sekolah semacam ini banyak dibuka di kota besar lainnya di Hindia Belanda. Namun untuk dapat diterima di HCS setidaknya, orang tua murid harus memiliki penghasilan minimal antara f. 75 – f. 100 per bulannya. Dengan begitu hanya kalangan yang cukup berada saja yang dapat masuk ke HCS.

Setelah berjalan selama dua dekade, cabang THHK di beberapa daerah mulai berencana untuk merubah status keanggotaannya dengan THHK Batavia. Mereka kemudian mengajukan permohonan pada pemerintah kolonial untuk memperoleh hak *Rectpersoon* (Badan Hukum). Dengan diperolehnya hak ini, maka cabang yang bersangkutan memiliki hak untuk dapat mengatur sendiri urusan organisasinya dan terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh THHK Batavia.

Dalam perkembangannya dewan pengurus di Purbalingga juga berencana untuk mengelola perkumpulannya secara mandiri. Namun sebelum itu pada 8 Juli 1927 Purbalingga memberi kabar pada pengurus di Batavia bahwa mereka sedang menyusun anggaran dasar untuk meminta hak *Rectpersoon* dengan tetap menggunakan nama THHK Purbalingga. Kemudian pada 30 Juli 1927, THHK Purbalingga memutuskan untuk membentuk kepengurusan baru yang terdiri dari 9 anggota yaitu Gan Thian Siok, Tan Hoei Liat, Kho Ting Hoen, Tan Hok Beng, Siem Kie Djian, O Ing Thian, Tjiong Tjiauw Se, Tan Tiong Tjay, dan Lie Hok Sing (Setiawan 2007:4). Mereka menduduki jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penasihat, dan empat orang Komisaris. Masa jabatan seorang ketua adalah tiga tahun dan pengurus lainnya selama satu tahun (Lihat "Anggaran Dasar THHK Purbalingga tahun 1958", Pasal 6). Beberapa bulan kemudian pada 12 November 1930, THHK Purbalingga kembali memberi kabar bahwa mereka telah memperoleh hak badan hukum pada 1 Desember 1927. Dengan demikian sejak saat itu *Hoenkiok* Purbalingga telah resmi berdiri sendiri dan terlepas dari THHK Batavia.

Kondisi pendidikan Tionghoa pada masa pendudukan Jepang sebenarnya tidak banyak tercatat dalam Sejarah Indonesia. Namun ada beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai acuan mengenai situasi yang terjadi pada masa itu. Menurut Leo Suryadinata, setelah ditutupnya sekolah-sekolah Belanda oleh Jepang pada bulan Maret tahun 1942, hanya sekolah berbahasa Indonesia dan Tionghoa yang tetap diperbolehkan beroperasi sejak 1 Agustus 1942, dengan syarat materi pembelajarannya tidak memuat upaya perlawanan terhadap Jepang (Leo Suryadinata, 1988:22-23). Dari sini menunjukan bahwa sekolah Tionghoa masih diberi ruang untuk berkembang. Oleh sebab itu dalam waktu singkat sekolah ini memperoleh banyak murid pindahan dari HCS. Kaum peranakan yang sebelumnya belajar di sekolah Belanda selanjutnya dianjurkan untuk mempelajari Bahasa leluhurnya (Suryadinata, 1984:156). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jepang menginginkan Masyarakat Indonesia dan kaum pendatang lainnya untuk kembali pada identitas kebudayaannya masing-masing. Oleh sebab itu secara tidak langsung kebijakan tersebut juga mendorong proses "Pengtionghoaan" kembali (*Resinisasi*) kaum peranakan, yang selama ini berusaha dicegah oleh Kolonial Belanda melalui sekolah-sekolah HCS.

Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi perubahan mendasar dalam bidang pendidikan. Pada masa ini kegiatan belajar mengajar belum dapat berjalan dengan normal. Di tengah kondisi keamanan yang belum stabil karena adanya upaya dari Belanda (NICA) untuk kembali menduduki Indonesia dengan membonceng sekutu. Pemerintah RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta membentuk panitia penyelidik pendidikan yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertugas mempersiapkan sistem Pendidikan baru yang sesuai dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemudian salah satu hasil dari panitia tersebut adalah merumuskan tujuan nasional pendidikan saat itu yakni mendidik para siswa agar menjadi warga negara yang cinta tanah air serta rela menyumbangkan tenaga dan juga pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara (Moehadi, 1981:108). Gagasan tersebut mencerminkan bahwa pada masa itu Indonesia masih diliputi oleh suasana perang sehingga pendidikan lebih difokuskan untuk memupuk rasa patriotisme generasi muda.

Pada bulan Oktober 1947, dikeluarkan sebuah kebijakan mengenai pemberian subsidi pada sekolah-sekolah Tionghoa, dengan syarat memasukan Bahasa Indonesia sebagai mata Pelajaran wajib yang dimulai dari kelas 3 SD selama 6 jam per minggunya (Suryadinata, 1988:23). Dengan demikian di sekolah THHK terdapat tiga pelajaran bahasa yaitu Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu menteri pendidikan juga memberikan ijazah pada guru-guru sekolah Tionghoa serta diizinkannya pengajaran Bahasa Mandarin di sekolah negeri atau bersubsidi yang sebagian besar muridnya merupakan etnis Tionghoa.

Awal tahun 1950-an menjadi sebuah babak baru bagi perjalanan pendidikan Tionghoa di Indonesia. Sekolah-sekolah ini mengalami peningkatan jumlah murid yang cukup signifikan. Namun tidak ada data pasti untuk jumlah siswa yang masuk di sekolah THHK Purbalingga. Pada tahun tersebut pemerintah tidak lagi memberikan subsidi pada sekolah Tionghoa. Namun warga negara Indonesia keturunan Tionghoa masih diperbolehkan bersekolah di sana. Sekolah-sekolah Tionghoa juga masih diperbolehkan beroperasi dengan normal. Pada tahun 1952 pemerintah mulai menjalankan pengawasan terhadap pendirian sekolah berbahasa pengantar Mandarin di Indonesia.

Setiap sekolah harus terdaftar di kementerian pendidikan serta bahasa Indonesia wajib dimasukan sebagai salah satu mata pelajaran sejak kelas 3, minimal 4 jam setiap minggunya. Namun di luar itu sebenarnya tidak ada pengawasan mendalam terhadap buku-buku maupun materi pembelajaran yang diberikan pada para siswanya.

Perlu diketahui bahwa setelah kemerdekaan, semua kegiatan keorganisasian di THHK Purbalingga masih terhenti. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan kebudayaan dan sosial. Hanya

bidang Pendidikan yang sudah dijalankan kembali melalui sekolah Tionghoa. Kemudian baru pada tanggal 4 Maret 1957 diadakan sebuah rapat umum, dengan agenda untuk mengaktifkan kembali kegiatan perkumpulan serta melakukan pergantian kepengurusan organisasi. Dari hasil pertemuan tersebut maka terbentuklah susunan kepengurusan baru sebagai berikut:

a. Ketua: Tan Hoei Liat
b. Wakil Ketua: Gan Koen Sin
c. Sekretaris: Tan Hok Liong
d. Bendahara: Kho Cheng Tin
e. Penasihat: Siem Kie Djian
f. Komisaris: Tjiong Tjiauw Sie, Gan Koen Hian, Nyonya Liem Bian Chye, Liem Liong Ing. (Lihat "Arsip AD/ART THKK Purbalingga 1958", pasal 1).

Gambar 2. Peringatan 50 thn berdirinya Perkumpulan THHK Purbalingga pada 20 Juni 1953



Sumber: Buletin *Dharma Mulia*,
Edisi Juli 2007, Hlm: 4

Berikut ini adalah beberapa kesaksian dari warga yang pernah menjadi murid di sekolah THHK Purbalingga. Kesaksian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika yang terjadi di sekolah tersebut. Bapak Yap Hwie Gwan (82 thn) yang lahir pada 1942, menceritakan bahwa ia menempuh Pendidikan di sekolah Tionghoa Purbalingga pada tahun 1949-1955. Dia mulai bersekolah sejak usia 7 tahun. Pada masa itu belum dikenal istilah Taman kanak-kanak, sehingga jenjang pendidikan di SD berlangsung selama 7 tahun yang diawali dari kelas 0 dan dilanjutkan dengan kelas 1-6. Pada masa itu di sekolah Tionghoa Purbalingga hanya terdapat satu ruang kelas untuk setiap jenjangnya. Kepala sekolahnya saat itu bernama Tan Bing Han yang berasal dari Gombong. Dalam proses pembelajaran, setiap kelasnya didampingi oleh seorang guru wali kelas yang akan mengampu semua mata Pelajaran yang ada. Kecuali untuk mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris akan diajar oleh guru yang berbeda.

Dalam Pelajaran Bahasa Mandarin ada dua metode yang digunakan yaitu dengan cara mendengarkan dan menghafal. Menurutnya *"Pelajaran zaman dulu memang serba sederhana, dan betul-betul pakai pikiran"* (Yap Hwie Gwan, 5 Oktober 2023, wawancara). Dari sini dapat dipahami bahwa sebagian besar metode pembelajaran saat itu dilakukan dengan cara menghafal sehingga sangat mengandalkan daya ingat serta dibutuhkan ketekunan agar dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan di kelas.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ibu Siek Hwa Nio (80 thn) yang lahir pada 1944. Beliau menceritakan bahwa dirinya baru mulai bersekolah pada usia 8 tahun (1952) karena kesibukan orang tuanya. Kemudian ia juga menuturkan bahwa orang tuanya menyekolahkannya di sana agar ia bisa berbahasa Mandarin dan nantinya dapat pergi ke Tiongkok. Menurutnya jumlah siswa saat itu

berkisar antara 30-35 siswa di setiap kelasnya. Mata pelajaran yang diberikan antara lain Bahasa Mandarin (*Kuo-Yu*), Bahasa Indonesia (kelas 3-6), Bahasa Inggris (kelas 5-6), berhitung, Ilmu Bumi (kelas 4-6), kesenian dan olahraga. Kemudian saat dimintai pendapat mengenai pendidikan saat itu, ia menuturkan:

> "*Oh ya bagus sekali, soalnya ada budi pekerti, kalau sekarang kan nggak ada. Misalnya ketemu orang harus begini... Jalan sebelah kiri...lalu lintas kayak gini, budi pekertine ada semua. Sama orang tua harus begini, sama guru harus begini.*" (Wawancara Ibu Siek Hwa Nio, Purbalingga, 11 Oktober 2023).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendidikan pada masa itu sangat menjunjung nilai sopan santun dan kepatuhan kepada orang tua dan guru-gurunya. Selain itu Ibu Hwa Nio juga menceritakan tentang kedekatannya dengan murid-murid lainnya sebagai berikut:

> *"Nggak tau mbedak-mbedakna lho dulu, wong orang-orang Indonesiane banyak yang masuk situ. Kan Imam (rumahnya di) depan sekolah ya masuk situ terus Handoyo, itu pada masuk situ....banyak kok. Tapi yang paling banyak memang di Purbolinggo. Yinni-ren (Orang Indonesia) itu banyak yang sekolah di sini, kalau di Purwokerto jarang. Paling-paling itu Purwanto sih dulu lah ya dari sini ikut pindah ke Purwokerto. Kalo di sini banyak temen saya, Maryoto, Sunyoto, itu sih...Bowo. Ya...sekelas itu ya nggak ada bedane, makane makan limpung bareng, ayo apa-apa bareng. Nggak ada beda-bedaan...China, Jawa, ngga...nggak ada, bagus...Jadi nggak ada masalah lah."*

Dari kesaksian tersebut telah menunjukan bahwa Ibu Hwa Nio merupakan sosok yang mudah bergaul dan akrab dengan semua teman-temannya di sekolah. Bahkan ia juga memiliki teman dari kalangan Bumiputera yang ikut bersekolah di sana. Tidak ada jarak sama sekali yang mereka rasakan. Hal ini menunjukan bahwa sekolah ini benar-benar terbuka bagi semua kalangan masyarakat di Purbalingga.

Pada bulan Maret 1957 terjadi pemberontakan PRRI (15 Februari 1958) di wilayah Sumatera dan Permesta (2 Maret 1957) di Sulawesi. Pemberontakan tersebut diduga mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Taiwan (Iskandar Jusuf, 2012:116). Dalam kondisi ini pemerintah RI kemudian mengumumkan keadaan perang dan menerapkan hukum militer. Dari situasi inilah pemerintah mengklaim bahwa pengawasan ketat terhadap sekolah-sekolah Tionghoa harus dijalankan demi keamanan nasional. Kemudian pada 6 November 1957, Ir, Djuanda selaku Menteri pertahanan menandatangani Peraturan Penguasa Militer No.989/PMT/Tahun 1957 tentang pengawasan pengajaran asing. peraturan ini melarang anak-anak Tionghoa yang sudah berstatus WNI untuk masuk ke sekolah berbahasa pengantar Tionghoa yang dikategorikan sebagai "sekolah asing". Ketentuan mengenai kewarganegaraan Indonesia tertuang dalam UU No. 3 tahun 1946. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang memiliki garis keturunan Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Oleh sebab itu kalangan Tionghoa Peranakan sebenarnya sudah dapat dikategorikan sebagai WNI. Selain itu kebijakan ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah masyarakat Tionghoa Peranakan tertionghoakan kembali di sekolah-sekolah tersebut.

Di samping itu terdapat kebijakan lainnya yang turut membawa perubahan besar terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia yaitu Peraturan Presiden RI No. 10 tahun 1959, yang secara tegas melarang orang-orang Tionghoa untuk melakukan perdagangan eceran di luar wilayah kabupaten/kota. Dengan kata lain mereka hanya diperbolehkan berjualan di wilayah perkotaan. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa kehidupan etnis Tionghoa terutama di Pulau Jawa sebagian besar bertumpu pada sektor perdagangan di berbagai wilayah termasuk pedesaan. Tentunya kebijakan ini akan sangat menyulitkan warga Tionghoa yang sehari-hari membuka usahanya di pasar

atau toko-toko di wilayah kecamatan/desa. Kebijakan diskriminatif inilah yang akhirnya memaksa sejumlah warga Tionghoa untuk kembali ke Tiongkok karena kehilangan mata pencahariannya di Indonesia.

Zhou Enlai, selaku menteri luar negeri Tiongkok menyatakan akan menerima warga Tionghoa untuk kembali ke Tiongkok dan bersedia memfasilitasi kepulangan etnis Tionghoa dengan menyediakan kapal-kapal penumpang yang berlabuh di sejumlah kota di Indonesia. Dengan demikian banyak Masyarakat Tionghoa yang akhirnya harus meninggalkan Indonesia. Dampak kebijakan tersebut juga turut dirasakan oleh Masyarakat Purbalingga. Menurut kesaksian Ibu Siek Hwa Nio (80 thn), ia menceritakan bahwa sekitar tahun 1960-an keluarganya juga sempat berniat untuk ikut dalam arus kepulangan tersebut. Saat itu ayahnya sudah mempersiapkan pakaian tebal, sepatu ukuran besar dan peti untuk membawa barang-barang mereka. Namun neneknya yang berasal dari keluarga peranakan tidak menyetujui rencana itu dengan berkata "*Ora olih lunga-lunga, mati urip neng Indonesia bae (tidak boleh pergi-pergi, hidup mati di Indonesia saja)* ". Setelah dipertimbangkan kembali mereka akhirnya membatalkan niatan tersebut.

Dalam situasi tersebut organisasi THHK di Purbalingga terus berupaya untuk mempertahankan eksistensinya di tengah gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Terlebih setelah dikeluarkannya peraturan yang melarang WNI untuk masuk ke sekolah-sekolah Tionghoa yang menyebabkan banyak penutupan sekolah pada tahun 1958. Kemudian pada masa itu juga banyak bangunan sekolah Tionghoa yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Namun hal ini tidak dialami oleh masyarakat Purbalingga. Komplek bangunan yang digunakan oleh THHK Purbalingga ini sebenarnya lebih dikenal sebagai Gedung *Kong Kwan*. Menurut penuturan Bapak Thio Tjay Loen:

> "*Gedung Kong Kwan itu enggak diminta sama pemerintah lho, karena apa...itu milik pribadi, milike nyonya Liem Bian Chye, diwehna maring (diberikan ke) Tan Biauw Khing. Aktene jual beli...jual beli tapi tidak terima uang, kayak jadi hibah tok."* (Wawancara Thio Tjai Loen, Purbalingga, 17 November 2023).

Gambar 3. Gedung Kong Kwan Purbalingga



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Jadi dari kesaksian tersebut dapat dipahami bahwa gedung itu awalnya dimiliki oleh salah satu warga bernama Nyonya Liem Bian Chye yang kemudian diberikan pada Bapak Tan Biauw Khing (Wawancara Thio Tjai Loen, Purbalingga, 17 November 2023). Dengan demikian bangunan tersebut juga memiliki sertifikat tanah yang lengkap sehingga saat itu tidak dapat diambil alih oleh pemerintah daerah.

Dengan kondisi tersebut, maka para pengurus THHK Purbalingga tetap dapat melanjutkan tujuannya yakni menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak sekitar yang kurang mampu. Oleh

sebab itu pada 19 Juni 1960, para pengurus memutuskan untuk mengubah nama organisasinya, dari THHK Purbalingga menjadi Perkumpulan Masyarakat Purbalingga (PMP) dan sekolah *Ling Hua* diubah namanya menjadi Sekolah Dharma Mulia. Selain itu tujuan pendirian THHK Purbalingga dalam AD/ART juga diubah dan dipersingkat menjadi hanya terlibat dalam usaha-usaha yang meliputi pendidikan, kebudayaan, dan kesosialan (Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Purbalingga (PMP), 31 Agustus 1960, Pasal 2). Keputusan itu diambil sebagai upaya untuk menanggulangi kebijakan PP. 10 yang telah diterapkan oleh pemerintah RI kala itu. Lalu dibentuklah sebuah lembaga baru bernama "Yayasan Pendidikan Dharma Mulia". Maksud dan tujuan dari Yayasan ini adalah mendirikan dan mengurus suatu sekolah untuk memberi pengajaran bagi taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, dan atas (Akta Yayasan Dharma Mulia, tanggal 31 Agustus 1960, Pasal 1.2.).

Sejak saat itulah sekolah ini dikenal sebagai Sekolah Dharma Mulia. Jenjang pendidikan yang dibuka adalah SD dan SMP. Dalam kegiatan belajar-mengajar, sekolah ini juga telah mengubah sistem pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia. Semua ini dilakukan untuk mempertahankan warisan kebudayaan leluhur serta aset yang dimiliki organisasi THHK Purbalingga yaitu gedung *Kong Kwan*.

Peranan organisasi THHK /PMP dalam Bidang Sosial dan Budaya di Purbalingga

Sejak awal pendiriannya, bangunan THHK Purbalingga juga sering difungsikan sebagai gedung serba guna. Mulai dari pementasan sandiwara atau tonil, pergelaran orkestra hingga kegiatan olahraga seperti basket dan sepak bola. Selain itu gedung ini sering disewakan pada masyarakat umum untuk pementasan wayang dan ketoprak. Kegiatan lainnya yang pernah diadakan oleh perkumpulan THHK adalah menggelar pasar malam dalam rangka perbaikan gedung *Kong Kwan* dan penambahan ruang kelas baru pada tahun 1957 (Setiawan, 2007: 4).

Peranan organisasi THHK Purbalingga dalam bidang kebudayaan yang paling kentara adalah keberadaan sekolah Tionghoa itu sendiri. Setelah menempuh pendidikan di sekolah ini tentunya anak-anak Tionghoa dapat mengenal kembali identitas kebudayaan leluhur mereka dan melatih kemampuan berbahasa Mandarin. Terutama bagi generasi muda Tionghoa yang pada umumnya lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah setempat untuk berkomunikasi sehari-hari. Menurut Penuturan Ibu Siek Hwa Nio dan Bapak Thio Tjai Loen, mereka saat ini masih bisa berbicara dalam Bahasa Mandarin. Meskipun sekarang mereka hanya mempergunakannya dalam kesempatan tertentu atau hanya menjadi bahasa pergaulan dengan kerabat maupun teman dekat. Dari sini terlihat bahwa para narasumber ini benar-benar merasakan manfaat dari pengajaran yang mereka peroleh di sekolah Tionghoa Purbalingga terutama dalam aspek kebudayaan seperti bahasa dan nilai-nilai Budi Pekerti. Dengan demikian melalui penggunaan bahasa Mandarin, mereka dapat lebih mengenal kultur leluhurnya sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap kelestariannya.

KESIMPULAN

Migrasi orang-orang Tionghoa ke Indonesia pada dasarnya didorong oleh kondisi sulit yang sedang terjadi di negerinya sehingga mengharuskan mereka untuk mencari daerah baru yang dapat digunakan sebagai tempat bermukim dan bekerja. Kehadiran Organisasi THHK di Purbalingga menunjukan adanya keresahan bersama terhadap nasib pendidikan anak-anak Tionghoa yang selama ini terabaikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, apabila para anggotanya dapat saling bersinergi dalam melaksanakan setiap program kerja yang ada agar tujuan yang diinginkan oleh setiap anggota dapat segera tercapai. Hal ini ditandai dengan hadirnya sejumlah pengusaha Tionghoa yang bersedia memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, untuk mendirikan sekolah Tionghoa yang sejalan dengan tujuan THHK Batavia. Semua itu

dilakukan dengan harapan agar sekolah tersebut nantinya mampu membentuk generasi muda yang terdidik dan selangkah lebih maju dari para pendahulunya. Sekaligus membantu anak-anak keturunan Tionghoa yang saat itu tidak dapat mengenyam bangku sekolah karena keterbatasan biaya.

Dari kesaksian para narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak Tionghoa yang bersekolah di sekolah THHK Purbalingga pada tahun 1945-1958 telah memperoleh pembelajaran yang setara dengan murid-murid di sekolah-sekolah nasional antara lain membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, kesenian dan olah raga. Selain itu sekolah-sekolah THHK juga sudah memasukan pelajaran tiga bahasa yaitu Mandarin, Indonesia dan Inggris. Oleh sebab itu sekolah ini banyak dipilih oleh para orangtua Tionghoa yang masih mengharuskan anaknya untuk bisa berbahasa Mandarin. Meskipun begitu sekolah THHK di Purbalingga juga menerima anak-anak dari kalangan Bumiputera yang ingin belajar di sana. Kemudian ada pula pengajaran budi pekerti sesuai dengan ajaran Konghucu yang telah menjadi ciri khas dalam pendidikan di sekolah-sekolah THHK. Berhubung sekolah Tionghoa di Purbalingga hanya membuka jenjang Sekolah Dasar. Maka para siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya harus pergi ke kota lain seperti Purwokerto, Tegal dan Semarang.

Jadi kehadiran organisasi THHK di Purbalingga selama lebih dari satu abad ini telah berhasil membawa berbagai perubahan pada kehidupan warga Tionghoa di sana. Organisasi THHK tidak hanya menjadi wadah bagi orang-orang Tionghoa untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada dalam komunitasnya. Namun yang jauh lebih penting adalah peranannya dalam bidang pendidikan. Baik melalui sekolah Tionghoa maupun sekolah Dharma Mulia, organisasi ini telah memberi kesempatan yang sama bagi setiap anak di Purbalingga untuk dapat mengenyam pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Organisasi ini juga pernah bekerjasama dengan Klenteng *Hok Tek Bio* untuk menyelenggarakan sejumlah kegiatan pada hari raya tertentu sebagai bentuk pelestarian budaya Tionghoa di Purblingga. Selain dipergunakan sebagai sekolah dan tempat pertemuan, gedung *Kong Kwan* juga sering disewakan kepada masyarakat umum untuk menyelenggarakan pertandingan olahraga dan pementasan seni. Dengan demikian organisasi ini dapat dikatakan turut berperan dalam memelihara kerukunan dan solidaritas antar warga masyarakat di Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Surat Kabar

Akta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Tiong Hoa Hwee Kwan Purbalingga (1958).

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Purbalingga (31 Agustus 1960).

Akta Yayasan Dharma Mulia Purbalingga (31 Agustus 1960).

Buku dan Jurnal

Dahana, A. "Kegiatan awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 2.1 (2000): 54-72.

Fauziyatur Rohmah, "Kritik Kwee Kek Beng terhadap Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Di Hindia Belanda." *Avatara* 2.3 (2014): 393-405.

Setiawan, Freddy. *"*Sejarah yang Hampir Terlupakan-Gedung Kongkwan Saksi Bisu Dinamika Kehidupan Masyarakat Tionghoa Purbalingga*"*. Buletin *Dharma Mulia* Media Informasi dan Komunikasi Masyarakat Tionghoa Purbalingga. Edisi 1- Juli 2007.

Hok Ham, Ong. 2005. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa.* Jakarta: Komunitas Bambu.

Iskandar Jusuf, 2012. *Dari Tiong Hoa Hwe Koan 1900 sampai sekolah Terpadu Pahoa 2008*, Jakarta: Penerbit sekolah terpadu Pahoa.

Joe Lan, Nio. 1940. *Riwajat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwe Koan - Batavia (1900-1939)*, Batavia: THHK Batavia.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Moehadi, dkk. 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers.

----------. 1988. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

----------. "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia". *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 1.2 (1999): 223-247.

Aziz, Munawir. 2021. *Bapak Tionghoa Nusantara*. Jakarta: Kompas.

W.P. Groeneveldt. 2018. *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*, Jakarta: Komunitas Bambu.

Wawancara:

Yap Hwie Gwan, 75 tahun.
Siek Hwa Nio, 73 tahun.
Thio Tjai Loen, 74 tahun.